

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Pada Tahun Anggaran 2020 keseluruhan tahapan perumusan dan persetujuan dari RAPBD Kota Bukittinggi telah dilaksanakan hingga menjadi APBD yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disahkan pada 31 Desember 2019 lalu. Namun keadaan Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahapan pelaksanaan anggaran yang ada pada bulan Maret 2020 menjadikan APBD tersebut harus mengalami penyisiran dan perubahan anggaran untuk dilakukannya *refocusing* anggaran dalam rangka penanggulangan Covid-19 pada wilayah Kota Bukittinggi. Perubahan anggaran ini dilaksanakan sebanyak tujuh kali dengan dua kali diantaranya merupakan *refocusing* anggaran yang dilaksanakan berdasarkan berbagai ketentuan dan pedoman undang-undang dari pemerintahan pusat. Walaupun demikian dalam pelaksanaan tahapan pergeseran anggaran ini tidak merubah dari siklus penganggaran tahunan ulang yang biasa dilakukan. Lee Robert, Johnson Edward & Joyce Philip menjelaskan bahwa suatu negara dalam melaksanakan tahapan penganggaran akan melakukan siklus penganggaran dengan empat tahapan utama, berupa Tahapan Persiapan dan Penyerahan, Tahapan Persetujuan, Tahapan Pelaksanaan hingga Tahapan Audit dan Evaluasi. Teori *Budget Cycle* oleh Lee Robert, dkk ini mampu menjelaskan fenomena perubahan anggaran APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.

Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2020 dalam pelaksanaan penganggarannya telah sesuai melaksanakan anggarannya sesuai dengan pendapat dari Lee Robert, Johnson Edward & Joyce Philip tersebut, tidak ada alur siklus penganggaran dari keempat tahapan tersebut yang dirubah, namun hanya dilakukan penambahan kebijakan dan instruksi pada tahapan Pelaksanaan dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 yang menyebabkan Pemerintahan Kota Bukittinggi harus menyisir ulang anggaran pemerintahannya untuk kemudian dapat di *refocusing* dan direalokasikan menjadi anggaran dalam Penanggulangan Covid-19 di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi. Maka setelah dilakukannya *refocusing* dan realokasi anggaran ini kemudian menyebabkan adanya perubahan anggaran APBD Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2020 tersebut, ada yang mengalami kenaikan anggaran dan ada juga yang mengalami penurunan anggaran. Sehingga dapat disimpulkan anggaran APBD Pemerintahan Kota Bukittinggi mengalami perubahan, seperti untuk total Pendapatan pemerintahan kota mengalami penurunan anggaran hingga persentase sebesar 14,08 % atau sebesar Rp. 113.226.952.263,00, dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 804.208.694.749,00 kemudian menjadi Rp. 690.981.742.486,00 setelah dilakukannya perubahan. Kemudian anggaran Belanja pemerintah kota juga mengalami penurunan anggaran dengan persentase sebesar 11,28 % dari total anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 996.015.381.339,00 kemudian menjadi Rp.883.714.285.381,00 sesudah dilakukannya perubahan, dengan perubahan *refocusing* tertinggi dialihkan untuk anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Rp. 2.200.000.00,00 kemudian naik hingga persentase sebesar 2.119,48 %,

sehingga anggarannya menjadi Rp. 48.822.486.987,00. Dimana keseluruhan anggaran dari BTT ini kemudian dianggarkan sebagai dana penanggulangan Covid-19 di Kota Bukittinggi yang kemudian dipergunakan untuk kebutuhan dalam tiga fokus utama penanggulangan Covid-19 berupa fokus kesehatan, fokus jaringan kesehatan, fokus peningkatan perekonomian yang akan dibelanjakan oleh tujuh SKPD Prioritas Penanggulangan Covid-19 di Kota Bukittinggi yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sosial hingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.

## 6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap bagaimana perubahan APBD Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2020 untuk penanggulangan Covid-19, peneliti melihat dalam pelaksanaannya karena kebijakan dan instruksi pelaksanaan pergeseran dan perubahan anggaran ini diberikan dalam waktu yang berdekatan membuat Pemerintah Kota Bukittinggi perlu waktu untuk cepat memahaminya, hal ini kemudian menjadi hambatan ketika pada Kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi mengalami kekurangan dari Sumber Daya Manusianya (SDM) pada Bidang Anggaran, staff SDM disana terlalu sedikit sehingga tidak jarang para pegawai melakukan kegiatan lembur sehari-hari padahal keadaan kesehatan saat itu sedang dalam bahaya karena penyebaran dari wabah Covid-19. Pelaksanaan *Work From Home* (WFH) juga sedikit menyulitkan koordinasi yang akan dilakukan antar lembaga sehingga tidak jarang pelaksanaan kegiatan pemerintahan sedikit terhambat. Sehingga saat pelaksanaan perubahan

anggaran ini sebaiknya pemerintah perlu mengkaji ulang pemberian pedoman aturan dengan memperhatikan tenggat waktu yang diberikan kepada pemerintahan di bawahnya untuk memahami dan melaksanakan anggaran tersebut.

Pelaksanaan penelitian ini peneliti lakukan dalam melihat perubahan anggaran APBD Kota Bukittinggi Tahun 2020 secara umum meliputi keseluruhan pergeseran, di sektor Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. peneliti harapkan penulisan ini dapat menjadi sumber informasi ataupun sumber literatur untuk penelitian berikutnya terutama untuk mengkaji lebih dalam mengenai masing-masing pergeseran saja dalam sektor Pendapatan, Belanja atau Pembiayaan Daerah saja sehingga akan terlihat secara rinci terhadap pelaksanaan perubahan anggaran APBD Kota Bukittinggi Tahun 2020 tersebut.

